

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jenjang Sekolah Dasar (SD) sebagai lembaga pendidikan dasar memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang keberadaannya merupakan fondamen dari pendidikan pada jenjang di atasnya. Oleh karena itu, jenjang Sekolah Dasar perlu ditata sedemikian rupa, agar mampu mencapai standar kelulusan yang telah ditargetkan sebagaimana pemerintah mengupayakannya dengan salah satu cara mencanangkan target kelulusan sesuai Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Dalam pelaksanaannya pendidikan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terkandung berbagai unsur atau komponen dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena terdiri dari berbagai komponen dalam pendidikan, maka dari tiap komponen itu bukan tidak mungkin akan menimbulkan permasalahan jika tidak dapat berperan secara optimal. Komponen yang dimaksud antara lain unsur tujuan, siswa, guru, kurikulum. Dari berbagai komoponen itulah maka masing-masing unsur harus bekerja secara maksimal dalam rangka pencapaian tujuan.

Sumber daya manusia menjadi salah satu permasalahan penting bagi negara berkembang seperti Indonesia. Untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia itu tidak terlepas dari masalah pendidikan, yang secara umum diidentikkan dengan pendidikan formal. Pendidikan formal diupayakan untuk mencapai salah satu tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab II pasal 3 yaitu: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pemerintah juga menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan termasuk anak yang mengalami kesulitan belajar tanpa adanya diskriminasi, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 Bab IV pasal 11 yang berbunyi:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Menurut Winarno Surakhmad (2002: 12) untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional maka pengelolaan pendidikan harus dikembalikan pada masyarakat. Dengan demikian, tidak ada lagi kebijakan di bidang pendidikan yang hanya mencerminkan kemauan menteri atau pemerintah saja, tetapi juga harus mencerminkan aspirasi dari masyarakat umum. Pemerintah memang harus menetapkan tujuan pendidikan nasional, tetapi masyarakat sendirilah

yang mengatur operasionalisasi pendidikannya. Hal ini merupakan tugas berat seorang guru terutama guru SD, karena merekalah yang meletakkan pondasi pada diri para peserta didik. Pondasi itulah yang merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan.

Pendidikan itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sangat kompleks, dalam kegiatan ini banyak sekali faktor yang saling mempengaruhi dan saling menunjang. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia untuk menunjang hidupnya. Melalui pendidikan yang baik manusia dapat membuka wawasannya dan hidup lebih baik. Pendidikan bisa diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan mulai pendidikan dasar hingga Perguruan Tinggi. Pendidikan di Sekolah Dasar sangatlah penting bagi peserta didik karena hal ini merupakan dasar perkembangan pengetahuan yang diperoleh siswa. Berbagai macam ilmu pengetahuan diberikan kepada siswa melalui berbagai macam mata pelajaran antara lain Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, PKn dan sebagainya. Pendidikan di Sekolah Dasar juga mengajarkan keterampilan-keterampilan dasar. Pengajaran keterampilan-keterampilan dasar adalah untuk mempersiapkan siswa dalam memasuki jenjang yang lebih tinggi .

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Dari Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diungkapkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dalam proses pembelajaran agar peserta didik menjadi manusia yang lebih baik. Pendidikan dasar sebagai pendidikan awal juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan yang selanjutnya.

Pemerintah Indonesia telah serius melakukan usaha peningkatan guru menjadi guru yang profesional melalui berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan serta pengembangan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan ini menyangkut usaha pada semua subsistem yang berkaitan dengan perjalanan karir guru. Diantaranya fungsi, peran dan kedudukan, guru perlu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik, sebab, guru yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, cerdas dan kompetitif, yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, sehat fisik dan rohani, memiliki pengetahuan yang luas, cakap, kritis dan bertanggung jawab.

Dalam usaha menjawab tuntutan membangun korp guru profesional, pada tingkat kebijakan makro, telah disiapkan landasan berupa berbagai produk peraturan perundang-undangan dalam peraturan sistem pendidikan nasional. Produk itu diantaranya adalah Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, Undang-Undang No 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi pendidik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) yang relevan. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Jika guru telah memenuhi syarat-syarat tersebut, mereka diberikan sertifikat pendidik. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang sangat progresif dan memberikan dampak yang sangat besar baik dalam manajemen tenaga kependidikan maupun dalam hubungannya dengan motivasi guru secara individual. Misalnya guru sudah mendapatkan sertifikasi, mereka berhak atas tunjangan profesi, yang akan sangat berpengaruh dalam budget pendidikan manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan.

Mengingat jumlah guru dalam jabatan yang sangat besar dan keinginan untuk segera meningkatkan kinerja mereka melalui program sertifikasi mendesak, perlu ditempuh dengan cara-cara cepat yang non konvensional untuk meningkatkan kinerja mereka. Program sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Tenaga Kependidikan (LPTK) melalui dua jalur, yaitu jalur penilaian portofolio (murni dan melalui Pendidikan dan Latihan

Profesi Guru –PLPG) dan jalur pendidikan profesi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 (<http://www.scribd.com/satria60/d/79592525-Permendiknas-No-40Tahun-2007-Sertifikasi-Bagi-Guru-Dalam-Jabatan-Melalui-Jalur-Pendidikan>), pendidikan profesi dilaksanakan melalui pendidikan prajabatan. Sebelum rencana jalur pendidikan prajabatan direalisasikan sejak tahun 2007, telah dirintis sertifikasi melalui jalur portofolio murni (melalui pengumpulan dan pemeriksaan *self report* dalam bentuk portofolio) dan PLPG (diberi pelatihan singkat secara khusus) bagi yang belum memenuhi standar dengan jalur murni. Program rintisan ini merupakan program yang harus dilaksanakan segera, sebagai usaha *cras program* yang menggunakan sumber daya besar dan merupakan sesuatu yang baru, implementasi kebijakan ini perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya.

Hal tersebut di atas juga didukung dengan apa yang ada pada Kompas 24 november 2010 menyatakan bahwa fenomena kecurangan dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan lewat portofolio kian menguak apa yang sesungguhnya. Telah jadi rahasia umum terungkapnya kasus plagiasi 1.700 guru di Riau menunjukkan sebagian kecil dari kekurangan dalam memenuhi portofolio sertifikasi guru. Kalau sudah terjadi ketidakjujuran dalam mendapatkan sertifikat pendidik sudah dapat dibayangkan bahwa proses pembelajaran yang akan terjadi selanjutnya.

Kompas tanggal 28 November 2010 menyebutkan bahwa “guru-guru yang sudah lolos seritfikasi umumnya tidak menunjukkan kemajuan, naik dari

sisi pedagogik, kepribadian, profesional maupun sosial. Guru hanya aktif menjelang sertifikasi, tetapi setelah dinyatakan lolos, kualitas mereka justru semakin menurun”. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Nasional Mohamad Nuh dalam pembukaan seminar dan pelatihan guru menulis di media massa yang diadakan harian Kompas dan Surya serta Ikatan Guru Indonesia di gedung PDAM Surabaya, Jawa Timur, minggu (31/10).

Dalam usaha mengetahui efektivitas program sertifikasi ini, perlu dilakukan penelitian kebijakan, dengan membandingkan kompetensi guru yang telah bersertifikat dan belum mendapatkan sertifikat serta mengetahui berbagai faktor yang ada hubungannya dengan kualitas kinerja guru. Berpijak dari keadaan itulah maka dalam penelitian ini akan mengangkat tema tentang kompetensi guru bersertifikat pendidik dan yang belum bersertifikat pendidik di SD Negeri se gugus III Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Pendidikan dasar di Indonesia belum sepenuhnya mengembangkan potensi peserta didik sehingga perlu diperhatikan oleh pemerintah.
2. Belum tercapainya tujuan pendidikan di Indonesia salah satu sebabnya adalah guru dalam proses pelaksanaan pendidikan belum profesional.
3. Guru yang sudah lulus sertifikasi dan mendapat gelar guru profesional belum tentu bisa meningkatkan kompetensinya seperti yang diharapkan

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan melihat kondisi serta permasalahan yang kompleks maka penelitian ini akan membatasi pada kompetensi pedagogik guru bersertifikat pendidik dengan kompetensi pedagogik guru belum bersertifikat pendidik di SD Negeri se Gugus III, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana kompetensi pedagogik guru bersertifikat pendidik di SD Negeri se gugus III Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas?
2. Sejauh mana kompetensi pedagogik guru yang belum bersertifikat pendidik di SD Negeri se gugus III Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas?
3. Sejauh mana kompetensi pedagogik guru bersertifikat pendidik dengan kompetensi guru belum bersertifikat pendidik di SD Negeri se gugus III Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui:

1. Kompetensi pedagogik guru bersertifikat pendidik di SD Negeri se gugus III Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.

2. Kompetensi pedagogik guru belum bersertifikat pendidik di SD Negeri se gugus III Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.
3. Kompetensi pedagogik guru bersertifikat pendidik dengan kompetensi guru belum bersertifikat pendidik di SD Negeri se gugus III Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di SD Negeri se Gugus III, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas ini memiliki beberapa manfaat antara lain.

1. Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberi masukan sekaligus menambah pengetahuan serta wawasan untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru bersertifikat pendidik dan yang belum bersertifikat pendidik.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga untuk menentukan kebijaksanaan tentang peraturan-peraturan kependidikan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Guru

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memaksimalkan kompetensi pedagogik guru bersertifikat pendidik dan yang belum bersertifikat pendidik

b. Bagi Siswa

Manfaat penelitian ini bagi siswa yaitu melalui penelitian ini motivasi siswa dalam proses pembelajaran akan meningkat.